

Kota Blitar



RLPPD

**RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA BLITAR
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

RLPPD Kota Blitar Tahun 2024 ini berisi laporan kinerja urusan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar secara ringkas untuk disampaikan kepada Masyarakat Kota Blitar, memuat capaian kinerja makro, urusan wajib pelayanan dasar, ringkasan keuangan daerah dan inovasi Kota Blitar selama tahun 2024 yang dibuat dalam rangka memberikan gambaran pelaksanaan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Blitar selama Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara umum penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kota Blitar selama Tahun 2024 berjalan baik, meskipun masih ada beberapa hambatan. Namun dengan kerja sama seluruh stakeholder, hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan petunjukNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan RLPPD ini tepat waktu. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada semua pihak atas dukungan dan partisipasinya dalam pembangunan di Kota Blitar. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan kinerja dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan RLPPD Kota Blitar ini, semoga dapat memberikan informasi yang komprehensif atas hasil-hasil pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah selama Tahun 2024, sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Blitar kedepan agar semakin baik

Blitar, 22 Maret 2025


WALI KOTA BLITAR

H. SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I



A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian kinerja (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	80,78	81,44	0,817 %
2.	Angka Kemiskinan	7,30%	6,75%	-0,7534 %
3.	Angka Pengangguran	5,24%	5,11%	-2,481 %
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,29%	5,33%	0,756%
5.	Pendapatan per Kapita ADHB	55,52	59,33	6,862%
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.397	0.353	-11,138%

Sumber : Kota Blitar dalam angka 2025

B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	4,205851



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
1.b.12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian
1.b.13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100
1.b.14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	0
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98.9125
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	92,47115



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100
1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangan	67.0847 %
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1.3422 %
1.d.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum))	100
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10.47 Menit
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100



**C. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN SEBELUMNYA**

1. Hasil EPPD Tahun 2024 Atas LPPD Tahun 2023

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kota Blitar tahun 2023 dilaporkan melalui pelaporan berbasis elektronik pada aplikasi SILPPD". adapun capaian LPPD Kota Blitar Tahun 2023 ditampilkan sebagai berikut :

No.	INDEKS	FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja
A.	INDEKS MAKRO	CAPAIAN MAKRO DAERAH	1	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023	1,06
			2	Angka Kemiskinan Tahun 2023	-0,95
			3	Angka Pengangguran Tahun 2023	-2,78
			4	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023	1,34
			5	Pendapatan Per Kapita Tahun 2023	7,62
			6	Ketimpangan Pendapatan Tahun 2023	6,55
B.	INDEKS MAKRO	PERTUM BUHAN KINERJA MAKRO	1	Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1,06
			2	Laju Penurunan Angka Kemiskinan	0,95
			3	Laju Penurunan Angka Pengangguran	2,78
			4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,34
			5	Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita	7,62
			6	Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan	6,55
C.	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB PELAYA NAN DASAR	PENDIDI KAN	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99,31
			1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,53
			1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,36
			1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00



No.	INDEKS	FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja
		KESEHA TAN	1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0.4356 %
			1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,00
			1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00
			1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,00
			1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00
			1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00
			1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00
			1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00
			1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00
			1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00
			1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00
			1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00
			1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00
			1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00
		PEKERJA AN UMUM DAN PENATA	1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	100,00
			1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	100,00

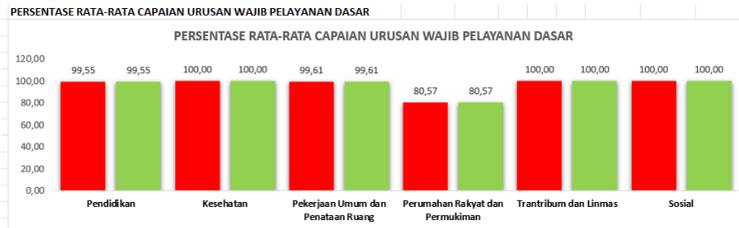


No.	INDEKS	FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja
		AN RUANG	1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00
			1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100,00
			1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97,85
			1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	100,00
			1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	98,61
			1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100,00
			1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00
			PERUMA HAN	1.d.1	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
		1.d.2		Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100,00
		1.d.3		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	100,00
		1.d.4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,86
		1.d.5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100,00
		TRANTIB UMLINMA S	1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00
			1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00
			1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00
			1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00
			1.e.5		100,00



No.	INDEKS	FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
			1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00
			1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,94
		SOSIAL	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100,00
			1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,00





2. OPINI LAPORAN KEUANGAN DALAM 10 (SEPULUH) TERAKHIR DI KOTA BLITAR

Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Blitar tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/Unqualified Opinion) dan berturut-turut selama 14 kali.

Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir

No	Tahun	No Surat	Opini BPK
1	LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2014	196/S-HP/XVIII.SBY/05/2015	Wajar Tanpa Pengecualian
2	LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2015	128/S/XVIII.SBY/05/2016	Wajar Tanpa Pengecualian
3	LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2016	108/S-HP/XVIII.SBY/05/2017	Wajar Tanpa Pengecualian
4	LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2017	112/S-HP/XVIII.SBY/05/2018	Wajar Tanpa Pengecualian
5	LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2018	526/S-HP/XVIII.SBY/05/2019	Wajar Tanpa Pengecualian
6	LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2019	513/S-HP/XVIII.SBY/06/2020	Wajar Tanpa Pengecualian
7	LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2020	481/S-HP/XVIII.SBY/05/2021	Wajar Tanpa Pengecualian
8	LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2021	466/S-HP/XVIII.SBY/04/2022	Wajar Tanpa Pengecualian
9	LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2022	496/S-HP/XVIII.SBY/05/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
10	LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2023	128/S-HP/XVIII.SBY/05/2024	Wajar Tanpa Pengecualian



D. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 01 Januari 2024 - 31
Desember 2024**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2024	%
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah	49.606.982.952,82	54.179.720.917,80	09,22
4	Pendapatan Retribusi Daerah	117.828.811.800,00	107.123.314.608,00	90,91
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.469.069.219,00	979.436.641,76	66,67
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.480.240.326,36	7.283.631.148,88	112,40
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)	175.385.104.298,18	169.566.103.316,44	96,68
8	PENDAPATAN TRANSFER			
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
10	Dana Bagi Hasil	89.258.553.000,00	89.902.080.000,00	100,72
11	Dana Alokasi Umum	443.225.689.700,00	443.238.812.000,00	100,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	30.349.577.000,00	26.140.002.027,00	86,13
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	62.083.729.350,94	62.034.580.679,00	99,92
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d. 13)	624.917.549.050,94	621.315.474.706,00	99,42
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
16	Dana Insentif Daerah	32.033.190.000,00	32.033.190.000,00	100,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (16)	32.033.190.000,00	32.033.190.000,00	100,00
18	Transfer Antar Daerah			
19	Pendapatan Bagi Hasil	102.620.000.000,00	106.082.874.400,00	103,37
20	Bantuan Keuangan	1.741.530.000,00	1.741.530.000,00	100,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (19 +20)	104.361.530.000,00	107.824.404.400,00	103,32
22	Jumlah Pendapatan Transfer(14+17+21)	761.312.269.050,94	761.173.069.106,00	99,98
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
24	Pendapatan Lainnya	9.338.187.768,02	9.145.864.913,42	97,94
25	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (24)	9.338.187.768,02	9.145.864.913,42	97,94
26	JUMLAH PENDAPATAN (7+22+24)	946.035.561.117,14	939.885.037.335,86	99,35
27	BELANJA			
28	BELANJA OPERASI			



No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2024	%
29	Belanja Pegawai	353.329.342.992,00	46.522.094.817,00	98,07
30	Belanja Barang dan Jasa	461.244.364.145,11	30.109.209.209,71	93,25
31	Belanja Hibah	46.498.000.409,00	45.820.694.832,00	98,54
32	Belanja Bantuan Sosial	18.694.901.600,00	18.650.356.985,00	99,76
33	Jumlah Belanja Operasi (29 s.d. 32)	879.766.609.146,11	841.102.355.843,71	95,61
34	BELANJA MODAL			
35	Belanja Tanah	6.150.000.000,00	2.696.905.689,00	43,85
36	Belanja Peralatan dan Mesin	22.661.241.936,64	20.744.067.013,00	91,54
37	Belanja Gedung dan Bangunan	58.865.301.373,71	55.789.927.363,00	94,78
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.978.167.378,54	51.349.969.945,00	95,13
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.549.291.290,00	1.541.538.234,00	99,50
40	Belanja Aset Lainnya	200429440,00	199.622.250,00	99,60
41	Jumlah Belanja Modal (35 s.d. 40)	143.404.431.418,89	132.322.030.494,00	92,27
42	BELANJA TIDAK TERDUGA			
43	Belanja Tidak Terduga	11.907.443.700,00	2.111.475.435,00	17,73
44	Jumlah Belanja Tidak Terduga (43)	11.907.443.700,00	2.111.475.435,00	17,73
45	Jumlah Belanja (33+41+44)	1.035.078.484.265,00	975.535.861.772,71	94,25
46	SURPLUS/DEFISIT (26-45)	(89.042.923.147,86)	(35.650.824.436,85)	40,04

E. INOVASI DAERAH

INOVASI DAERAH TAHUN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Inspektorat Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	SI-PATRIAWAS (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan)	<ul style="list-style-type: none"> a. mempercepat proses penyelesaian Laporan Pemantauan TLHP; b. meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah khususnya terkait tingkat penyelesaian tindaklanjut Hasil pengawasan APIP dan Eksternal lainnya; c. memperoleh pembelajaran dari permasalahan yang sudah pernah dimuat dalam LHP dan rekomendasi yang diberikan terkait dengan permasalahan penyelesaian tindaklanjut; d. memperoleh data hasil pengawasan yang akurat sebagai bahan laporan kepada Walikota Blitar; e. efisiensi waktu dan biaya karena Audit tidak perlu lagi melakukan penggandaan dan tidak perlu lagi datang ke kantor Inspektorat Daerah untuk mengantarkan dokumen-



NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				dokumen tetapi cukup diupload dalam sistem informasi untuk kemudian dilakukan proses Pemantauan TLHP oleh petugas dari Inspektorat Daerah.
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Roadshow Jaring Aspirasi Pembangunan Jangka Panjang 2025 - 2045 Kota Blitar	a. Mendapatkan masukan dan rujukan dalam menyusun RPJPD 2025-2045 b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kota Blitar
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kinarya Praja Pemerintah Kota Blitar	Memberikan informasi yang valid tentang pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ALAS CATUR (Aplikasi Database Perencanaan Infrastruktur)	Aplikasi ALAS CATUR (Aplikasi Database Perencanaan Infrastruktur) merupakan aplikasi yang menyajikan peta tematik yang dapat menggabungkan beberapa pilihan layar yaitu, opsi basemap atau peta dasar, data wilayah administrasi, lokasi kegiatan perencanaan bidang infrastruktur beserta dokumennya, dan data pendukung kewilayahan Kota Blitar yang ingin ditampilkan secara keseluruhan atau sebagian saja sesuai dengan kebutuhan <i>query</i> atau pencarian data oleh pengguna aplikasi WebGIS dan Sistem Informasi Geografis yang dibuat dalam aplikasi WebGIS ini tidak hanya mampu mengelola data spasial atau keruangan dari kegiatan perencanaan bidang infrastruktur yang sudah terpetakan, tapi juga dimungkinkan pengembangan aplikasi untuk mengelola data dan dokumen terkait kegiatan perencanaan bidang infrastruktur lainnya, seperti riwayat dan relasi antar dokumen perencanaan dalam satu lokasi kegiatan bidang infrastruktur
5	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	SIMANTAB (Sistem Informasi Tanah Dan Bangunan)	a. Dengan adanya SIMANTAB ini kegiatan pembukuan dan pengelolaan BMD berupa aset tetap yaitu tanah dapat terakomodasi secara lebih optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru. b. Tersedianya Informasi Tanah dan Bangunan Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam bentuk peta yang <i>up to date</i> dan bisa digunakan sebagai instrumen perencanaan wilayah.
6	Dinas Ketahanan	Inovasi Tata Kelola	Aplikasi SI-PETANI	1. Manfaat Internal : a. Terwujudnya kemudahan pengumpulan data Potensi



NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pangan Dan Pertanian	Pemerintahan Daerah		<p>peternakan, pertanian, pangan dan perikanan yang akurat.</p> <p>b. Sebagai salah satu inovasi dalam mengembangkan potensi dan kemampuan diri setiap ASN didalam menjalankan tugas pelayanan di semua bidang.</p> <p>c. Adanya peningkatan pengetahuan dan kinerja manajemen pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.</p> <p>2. Manfaat Eksternal :</p> <p>a. Mudah mendapatkan informasi Potensi peternakan, pertanian, pangan dan perikanan secara akurat.</p> <p>b. Capaian Indikator Program Nasional meningkat.</p> <p>c. Terwujudnya informasi digital terkait dengan hasil kelitbangan dan inovasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</p>
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	APLIKASI DAPUM (Data Perkembangan Usaha Mikro)	<p>a. Terbentuknya/ terwujudnya database pelaku usaha mikro di Kota Blitar.</p> <p>b. Kemudahan dalam pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan bagi para pelaku usaha mikro.</p> <p>c. Pengumpulan data perkembangan usaha mikro dapat dilakukan secara real-time dan di input-kan langsung oleh surveyor sehingga bisa langsung ditampilkan lebih terkini.</p> <p>d. Para pemangku kepentingan dapat mengkses dan memperoleh data perkembangan usaha mikro secara cepat dan mudah sesuai dengan yang dibutuhkan.Para pemangku</p> <p>e. Kepentingan dapat mengetahui permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha mikro sehingga dapat memberikan upaya pendampingan dan pelayanan publik yang lebih tepat dan sesuai.</p>
8	Sekretariat DPRD	Inovasi Pelayanan Publik	Sistem Informasi Kinerja Dewan (Si-Kawan)	<p>Manfaat Internal:</p> <p>a. Untuk memfasilitasi Peningkatan Kinerja DPRD. Dari identifikasi kondisi organisasi saat ini, maka kondisi yang diharapkan pada Sekretariat DPRD Kota Blitar dapat terpenuhi;</p> <p>b. Terdokumentasikan nya secara sistematis dan digital Rencana Kerja DPRD, dan Progres Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD sehingga capaian kinerja DPRD dapat terukur dan dinilai; dan</p>



NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>c. Terfasilitasinya masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan aduan secara mudah dan murah melalui aplikasi yang berbasis web.</p> <p>Manfaat Eksternal:</p> <p>d. Membantu Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memantau progress pelaksanaan kegiatan DPRD;</p> <p>e. Sebagai alat bantu dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan DPRD</p> <p>f. Mendukung layanan pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat</p>
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Inovasi Pelayanan Publik	PEKAN KOLABJAR ASIK (Pekan Kolaborasi Belajar ASN Blitar Keren) Tahun 2023	<p>Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Inovasi PEKAN KOLABJAR ASIK:</p> <p>a. Menambah wawasan dan Pengetahuan serta pengembangan kompetensi Aparatur. Sehingga menghasilkan aparatur yang profesional</p> <p>b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Mengurangi Biaya Kegiatan (terutama penyediaan makanan dan minuman serta biaya cetak materi)</p>
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Inovasi Pelayanan Publik	E-Landa (E-Layanan dan Database) Bakesbangpol	<p>a. Manfaat Umum : meningkatkan suasana yang kondusif di daerah sehingga dapat diperoleh manfaat yang besar dari kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.</p> <p>b. Manfaat Khusus : Secara Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan pedoman yang jelas tentang pengelolaan konflik di daerah; 2) Menyatukan persepsi dan langkah atas penanganan konflik di daerah; 3) Memberikan kejelasan tentang prosedur pencegahan konflik di daerah; Pola kerjasama keterkaitan informasi dengan stakeholder. 4) Secara Eksternal : <p>a. Memberikan rasa aman, tenang, kondusif dalam penyelenggaraan kemasyarakatan, ekonomi;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas pelayanan public;</p> <p>c. Meningkatkan kepuasan Masyarakat; Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah</p>
11	Dinas Pendidikan	Inovasi Pelayanan Publik	Klinik Pendidikan	<p>Inovasi Klinik Pendidikan memiliki manfaat sebagai berikut:</p> <p>a. Memberikan layanan pengaduan Masyarakat baik masalah yang menyangkut hak-hak belajar anak</p>



NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>yang tidak terlayani, kesulitan mengajar yang dialami oleh guru maupun peserta didik, serta kesulitan pendampingan belajar yang dialami orang tua peserta didik</p> <p>b. Membantu bimbingan belajar terhadap peserta didik dan orang tua, supervisi pembelajaran untuk guru dan kepala sekolah</p> <p>c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah media belajar mengajar yang dihadapi guru, peserta didik dan kepala sekolah</p> <p>d. Sebagai pusat konsultasi, mediasi dan advokasi bagi seluruh masyarakat yang mempunyai kendala-kendala terhadap hak-hak pembelajaran untuk anak-anak di masa pandemi</p>
12	Dinas Pendidikan	Inovasi Pelayanan Publik	Parenting MamaMia (Stimulasi Anak Berkebutuhan Khusus oleh Orang Tua di Rumah)	Dengan adanya program ini, orang tua anak berkebutuhan khusus tidak perlu menunggu, dapat segera mendampingi putra putrinya di rumah. Serta hambatan dapat dikonsultasikan kepada tim terapis serta pengalaman dapat di share kepada orang tua lainnya. Dampak lain yang didapat yaitu orang tua merasa termotivasi, karena ternyata banyak orang tua lain yang mempunyai permasalahan yang sama.
13	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	GESANG MANTANKU (Gerakan Sumbang dan Pemantauan Kesehatan dengan Kunjungan Rumah)	Dengan peningkatan derajat kemandirian keluarga terhadap kesehatan akan menurunkan angka kesakitan anggota keluarga dan pada akhirnya mampu melakukan tindakan promotif preventif dan role model keluarga di wilayahnya tinggal
14	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	KAMPUNG BEBAS JENTIK	<p>1. Bagi Masyarakat Pelaksanaan program "KAMPUNG BEBAS JENTIK" diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam mencegah terjadinya kasus penyakit DBD.</p> <p>2. Bagi Puskesmas Dengan menurunnya kasus DBD di Wilayah Kecamatan Kepanjenkidul karena pelaksanaan program "KAMPUNG BEBAS JENTIK", diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran anggaran untuk kegiatan terutama fogging.</p>
15	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	PENINGSET CATIN (Pelayanan Terintegrasi Menuju	Dengan adanya Program Peningset Catin, calon pengantin mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi secara terpadu



NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sehat Calon Pengantin)	serta memiliki kesiapan fisik dan mental untuk membina kehidupan pernikahan. Program ini melibatkan Tim Pendamping Keluarga, KUA dan DP3AP2KB sehingga tercapai pelayanan Calon Pengantin terpadu dan terintegrasi.
16	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	SI MALU CERIWIS (Skrining Masyarakat Kelurahan Cegah Tuberkulosis Di Wilayah Sananwetan)	Manfaat yang diperoleh : menambah pengetahuan pemahaman dan kesadaran akan keluhan dan gejala TBC, serta meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan, terutama puskesmas untuk melakukan mendapatkan tata laksana dan terapi pengobatan tuberkulosis dengan cepat dan tepat, sehingga masyarakat bisa terhindar dari penularan TBC agar tidak terjadi kesakitan, kematian dan kecacatan.
17	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	BULAN MERINDU (Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Terpadu)	Melalui sistem susur bumil dengan Bu Nya E Sehat dan Gelang Kendit pada program Bulan Merindu, masyarakat sebagai perpanjangan tangan puskesmas diharapkan ikut berperan aktif dalam memantau kesehatan ibu hamil, mendorong perilaku sehat pada ibu hamil, dan memunculkan tata laksana pemantauan kesehatan yang aman dan nyaman. Program ini mengajak masyarakat diluar kader dan nakes untuk menjadi pendamping ibu hamil serta menjadi perpanjangan tangan puskesmas dalam melakukan sweeping.
18	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	TEMAN UMI (Sistem Layanan Laboratorium Kesehatan Terintegrasi)	Manfaat inovasi ini yaitu: e. Pelayanan yang ada di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Blitar dapat diakses lebih cepat, akurat, relevan, dan tepat waktu f. Masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan terkait dengan pemeriksaan laboratorium kesehatan yang ada di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Blitar g. Masyarakat lebih mudah dalam menyampaikan keluhan yang ada di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Blitar h. Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Blitar lebih mudah menginventaris kebutuhan masyarakat dan melakukan feedback terhadap keluhan masyarakat



NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	BERONDONG NGOPI (Ber-Aktifitas Naik Odong-Odong dan Ngolah Pikir)	Melalui inovasi ini tingkat kesembuhan ODGJ meningkat signifikan, di tahun 2021 mencapai 24 % (28 orang mandiri dan 4 diantaranya telah produktif) dan di tahun 2022 mencapai 47% (65 orang mandiri dan 9 diantaranya telah produktif), dibandingkan sebelum inovasi ini belum tercapai tingkat kesembuhan (Mandiri dan produktif). Saat ini produksi jamu telah dikelola ODGJ 1 orang, tahu dikelola ODGJ 1 orang, berkebun 1 orang, merajut 1 orang, membuat bantal 1 orang. Penghasilan ODGJ yang telah produktif relative tinggi, antara lain seorang ODGJ yang berproduksi jamu perbulannya mendapatkan hasil untung bersih sekitar 350 ribu – 400 ribu, ODGJ yang berjualan minyak wangi perbulannya mendapatkan untung bersih 200 ribu – 300ribu, dan ODGJ yang berjualan tahu memiliki penghasilan kotor perhari nya 100 – 150 ribu.
20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Inovasi Pelayanan Publik	DIOPEN (Disclosure Informasi Publik Terintegrasi)	<p>Program DIOPEN (Disclosure Informasi Publik Terintegrasi) ini di implementasikan untuk peningkatan efektivitas pelayanan informasi publik. Selain itu secara khusus manfaat yang diharapkan dihasilkan oleh proyek perubahan</p> <p>ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu manfaat internal dan manfaat eksternal seperti dijelaskan sebagai berikut:</p> <p>Manfaat Internal (Manfaat Bagi Dinas Kominfotik/PPID Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di badan publik; Koordinasi penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik dibawah penguasaan badan publik yang dapat diakses oleh publik; Memudahkan Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamananinformasi; Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap satuan kerja dan unit pelaksana teknis di badan publik bersangkutan untuk pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;Melakukan verifikasi bahan informasi; dan Penetapan DIP yang dikuasai oleh badan publik.



NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Dinas Perhubungan	Inovasi Pelayanan Publik	SILASAR (Sistem Layanan Aduan dan Saran)	<p>Manfaat Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendukung kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tupoksi organisasi Meningkatkan kinerja pemeliharaan perlengkapan jalan berdasarkan evaluasi internal dan laporan/aduan masyarakat <p>Manfaat Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> Masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah dalam hal pelayanan pengaduan Terciptanya keamanan di tengah-tengah masyarakat dalam penggunaan jalan karena perlengkapan jalan tersedia dengan baik
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Inovasi Pelayanan Publik	Jemput Bola Layanan Perizinan Berusaha (JEMPOL LISA)	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat mendapatkan akses dan informasi pelayanan dengan cepat dan terjangkau tanpa harus datang ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Para pelaku usaha dapat dilayani dengan mudah untuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Efisiensi pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu sehingga membuat pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu untuk kegiatan lain yang produktif.
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Inovasi Pelayanan Publik	JELANTER (JEMPUT BOLA)	<p>Tujuan inovasi perangkat daerah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan tingginya kesadaran pentingnya tera/tera ulang dalam perdagangan Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tera/tera ulang Tersedianya sumber daya manusi dalam kegiatan tera/tera ulang Meningkatkan kompetensi/literasi yang memadai dalam tera/tera ulang
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Inovasi Pelayanan Publik	PAK GIMIN SEMANGAT (Paket Gizi Ibu Hamil Nambah Sehat Mencegah Stunting)	Kehamilan Sehat dan Tidak melahirkan anak beresiko stunting
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	Inovasi Pelayanan Publik	SIIP MAS! (Suami Ikut MOP, Nyaman, Hebat dan Sejahtera)	sampai dengan tahun ini Kota Blitar masih tertinggi dalam komitmen memberikan jaminan dan kepastian akseptor agar kehidupannya sejahtera.



NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Selain itu inovasi SIIP, MASI ini sangat mudah direplikasi karena masing – masing daerah memiliki potensi yang sama untuk digerakkan dan dibangun sinergitasnya antara Suami yang sudah mengikuti MOP dengan Kader KB dan Tenaga Lapangan Penyuluh KB
26	Dinas Sosial	Inovasi Pelayanan Publik	Ransum Peduli Lansia (Rapelan)	Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa permakanaan sehat bagi lanjut usia terlantar sebagai upaya perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dan/atau nutrisi.
27	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Inovasi Pelayanan Publik	Kang Nawa Sebar Damai (Tukang Rusunawa Senang Bayar Mudah Aman Retribusi)	Masyarakat/ Warga Penghuni Rusunawa mendapatkan kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan proses pembayaran retribusi Rusunawa yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun sehingga pembayaran bisa tepat waktu. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar
28	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Inovasi Pelayanan Publik	NOVI DAN SELA RUPAWAN Bermitra Jamin Daging ASUH dan Dongkrak Kenaikan PAD	Inovasi yang kemudian kami namai NOVI dan SELA RUPAWAN BERMITRA, melibatkan kemitraan dengan pengusaha lokal serta teknologi railing system dengan metode stunning serta menyediakan drum system untuk mewujudkan pelayanan yang mudah diakses semua lapisan masyarakat (inklusif) dengan biaya murah namun berkualitas unggul dan terjamin
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Inovasi Pelayanan Publik	SAKU CITRA	a. Memberikan layanan wisata buku lebih cepat, tepat dan nyaman karena berbasis online b. Penyusunan data dan dokumentasi wisata buku yang lebih sistematis, periodik dan lengkap dengan pengarsipan secara komputerisasi sehingga proses pemeliharaan datanya jauh lebih mudah dan terjamin
30	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Inovasi Pelayanan Publik	Penak Keliling Mas (Pelayanan Adminduk Keliling Masyarakat)	Proses percepatan permohonan dokumen adminduk
31	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Inovasi Pelayanan Publik	Penak Mas Edi	Status perkawinan bagi warga non muslim telah sah dan diakui oleh negara
32	Dinas Kependudukan Dan	Inovasi Pelayanan Publik	Pecel Blitar (Pelayanan Cepat Langsung Bayi	Akta kelahiran dapat diperoleh sebelum pasien pulang dari rumah sakit



NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pencatatan Sipil		Lahir Ibu Terima Akta Lahir)	
33	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Inovasi Pelayanan Publik	E-Takziah	Akta Kematian dapat diperoleh langsung sehari jadi
34	Kecamatan Sukorejo	Inovasi Pelayanan Publik	Aplikasi Jelasin Sitarjo	Selain memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara terpadu manfaat lain dari aplikasi ini adalah sebagai inovasi pelayanan publik Kecamatan Sukorejo agar lebih cepat dan mampu memberikan dampak positif. Selain itu terdapat pula informasi pengajuan santunan kematian sehingga proses pengajuan santunan kematian lebih transparan dan terkendali dengan baik. Selain itu dalam aplikasi ini nantinya menyediakan media promosi yang penting bagi pemasaran produk-produk unggulan dari Kecamatan Sukorejo. Sehingga ekonomi dari masyarakat bisa berkembang. Selain media promosi produk, aplikasi ini nantinya juga dapat mempromosikan event kecamatan dan event kota sehingga sasaran audience event tersebut lebih besar lagi dan sukses lagi.
35	Kecamatan Kepanjenkidul	Inovasi Pelayanan Publik	AGEMAN MAS RAHMAT (Aplikasi Gawe Menakne Masyarakat Kelurahan Se-Kecamatan Kepanjenkidul)	a. Segala bentuk kegiatan bisa di upload di Aplikasi Ageman Mas Rahmat b. Mengurangi waktu pengguna layanan/waktu untuk mengurus layanan lebih efektif
36	Kecamatan Sananwetan	Inovasi Pelayanan Publik	SIMPONI CINTA (Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Online, Cepat, Inovatif, dan Tanggap)	a. Efisiensi pelayanan pendaftaran pernikahan/perkawinan b. Mempermudah manajemen dokumen pernikahan/perkawinan bagi petugas c. Meminimalisasi terjadinya praktik gratifikasi
37	Kelurahan Tanggung	Inovasi Pelayanan Publik	GERAKAN CEPAT PELAYANAN TANGGUNG (GERCEPYANG)	Manfaat yang di peroleh dari penerapan inovasi gercepyang Penerapan inovasi "Gercepyang" di Kelurahan Tanggung memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, baik bagi masyarakat, kelurahan, maupun perangkat daerah. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi inovasi ini: a. Peningkatan Efisiensi Pelayanan: Proses pengajuan dan pengambilan surat menyurat menjadi lebih cepat,



NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh warga dan petugas pelayanan</p> <p>b. Peningkatan Aksesibilitas: Warga dapat mengakses layanan publik tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan, memudahkan akses bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kendala transportasi Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pelayanan publik dengan kemampuan untuk mengajukan permohonan, memantau status permohonan, dan memberikan umpan balik melalui platform WhatsApp</p> <p>c. Reduksi Beban Administratif: Mengurangi beban administratif di kantor kelurahan dengan memanfaatkan platform digital untuk proses pengiriman persyaratan dan pemberitahuan status</p> <p>d. Transparansi dan Kepercayaan Masyarakat: Peningkatan transparansi dalam proses pelayanan memberikan kepercayaan kepada masyarakat, karena mereka dapat melihat secara langsung status permohonan mereka dan informasi terkait lainnya</p> <p>e. Efisiensi Operasional Perangkat Daerah: Perangkat daerah dapat mengelola permohonan dengan lebih efisien, mengurangi birokrasi dan antrean di kantor kelurahan</p> <p>f. Peningkatan Keamanan Data dan Privasi: Mengimplementasikan langkah-langkah keamanan data dan privasi yang ketat</p>
38	Inspektorat Daerah	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	KLINIK PENGAWASAN (KLIK WAS)	<p>Manfaat inovasi Klinik Pengawasan (Klik Was) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Dapat mengkonsultasikan berbagai masalah seperti potensi penyimpangan, pelanggaran aturan maupun kerugian daerah atas suatu program atau kegiatan</p> <p>b. Dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam perencanaan pekerjaan sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku</p> <p>c. Meningkatkan kualitas tata Kelola yang bebas dari berbagai penyimpangan, manajemen risiko dan</p>



NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				pengendaliannya, sarana sosialisasi, koordinasi dan penyamaan persepsi terkait penyelamatan sumber daya daerah serta meningkatkan kinerja dan peran aparat pengawasan di Kota Blitar
39	Dinas Pendidikan	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Komidi Elok (Komik Digital Berbasis Kearifan Lokal)	Inovasi KOMIDI ELOK memiliki manfaat sebagai berikut: d. Peserta didik mengetahui, mengenal, dan memahami kearifan lokal yang ada di Kota Blitar. e. Menkuatnya karakter nasionalisme peserta didik.
40	Dinas Lingkungan Hidup	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	QRANA (QR FLORA FAUNA)	QRANA memudahkan Dinas Lingkungan Hidup selaku pengelola dalam memonitor koleksi hewan dan tanaman di kedua taman tersebut.
41	Dinas Lingkungan Hidup	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	GEMPITA BLITAR (Gerakan Masyarakat Peduli Kelola Sampah Kota Blitar)	f. Lingkungan menjadi bersih, asri, indah dan nyaman untuk ditempati g. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani h. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pilah pilih sampah yang bernilai ekonomi
42	Kelurahan Tanjungsari	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	KEBUN DASHAT KAMPUNG KB SENTOSA KELURAHAN TANJUNGSARI (Kebun Dapur Sehat Atasi Stunting Kampung KB Sentosa Kelurahan Tanjungsari)	Manfaat dari pelaksanaan Program Kebun DASHAT Kampung Kb Sentosa Kelurahan Tanjungsari adalah tercapainya akses pemenuhan gizi untuk balita stunting dan ibu hamil dari keluarga kurang mampu sehingga diharapkan dapat menekan prevalensi angka stunting.